

BAB V

KESIMPULAN

Selanjutnya di bab V yang berisi kesimpulan, penulis akan mengkonklusikan hal-hal berkenaan dengan kebijakan luar negeri Turki sejak menjadi negara sekuler hingga AKP memenangkan pemilu di tahun 2002. Penulis juga akan meringkas data-data tentang peran-peran AKP dalam mewujudkan perdamaian di Timur Tengah selama AKP menduduki tampuk pemerintahan di Turki yang dikorelasikan dengan faktor-faktor yang menyebabkan Turki mengarahkan kebijakan luar negerinya kepada negara-negara di Timur Tengah.

Sebagaimana yang kita ketahui, bahwa semenjak kemenangan Adalet ve Kalkinma Partisi (AKP) dalam kancah perpolitikan Turki tahun 2002, kebijakan luar negeri Turki bergeser dalam langkah-langkah maupun target-targetnya. Sebelumnya Turki selalu ingin mendapatkan pengakuan dari Barat dan sekutunya dengan menjadi anggota NATO yang setia, serta mendukung Amerika dan Israel dalam setiap invasinya. Namun sejak AKP berkuasa, kebijakan Turki pun berorientasi ke Timur Tengah, bahkan sampai menjadi pembela Negara-negara di Timur Tengah serta mediator konflik yang terjadi antar Negara seperti konflik Israel-Suriah ataupun konflik internal seperti yang terjadi di Palestina antara Hamas dan Fatah.

Kebijakan-kebijakan luar negeri Turki sebelum berkuasanya AKP justru selalu menjadi pemicu konflik dengan Negara-negara Timur Tengah. Misalkan saja pada era Kemalis atau di tahun-tahun awal terbentuknya Republik Turki, Negara ini selalu terseret isu perbatasan dengan Syria dan Irak dalam

menjadikan citra Turki sangat buruk di mata Negara-negara Timur Tengah namun dianggap sebagai mitra strategis oleh Israel dan Amerika.

Pada masa Partai Demokrat pun Turki tak lepas dari permasalahan dengan Timur Tengah. Ambisi Turki untuk diakui oleh Barat dan menjadi anggota NATO membawa Turki seperti ajudan setia yang rela mengeluarkan biaya serta usaha sekeras apapun demi menyenangkan Amerika dan sekutunya. Aliansi-aliansi di Timur Tengah yang bermunculan dengan adanya gelombang nasionalisme Arab yang dihembuskan oleh Gamal Abdun Nasser membuat Turki semakin geram dan hal itu memperburuk hubungan Ankara-Cairo di tahun-tahun tersebut.

Pada era Turki Republik Kedua, hubungan Turki dengan Amerika dan Israel semakin mesra. Dengan adanya hubungan baik antara Israel dan Turki, menjadikan hubungan Turki dengan Palestina semakin buruk. Apalagi dengan adanya dukungan Turki terhadap eksistensi Negara Israel serta konfliknya dengan Cyprus yang semakin memanas, membuat Negara-negara Timur Tengah hanya memandang Turki sebagai musuh yang pantas untuk dilawan bersama.

Pada era Turki Republik Ketiga, Turki pun semakin aktif dalam dukungannya terhadap invasi serta perang-perang yang terjadi di Timur Tengah. Dalam kurun waktu ini, Turki sudah mensupport banyak hal untuk invasi Amerika Serikat ke Irak, termasuk mengizinkan Amerika untuk menjadikan wilayah Turki sebagai pangkalan perang dalam serangannya ke Irak saat itu. Turki juga mendukung terjadinya perang Teluk yang terjadi antara Irak dan Kuwait yang

Tidak diragukan lagi bahwa kebijakan politik luar negeri Turki terutama di kawasan Arab-Islam mengalami berbagai perubahan signifikan sejak naiknya Partai Keadilan dan Pembangunan ke puncak kekuasaan di Turki dan sebelumnya dipengaruhi oleh dua tragedi luar biasa, yaitu serangan 11 September 2001 dan invasi Amerika Serikat terhadap Irak tahun 2003. Di samping sikap Uni Eropa yang menghambat masalah penggabungan Turki ke Uni Eropa. Peristiwa-peristiwa ini membantu terpulihkannya kerangka luar negeri Turki yang lebih terbuka terbuka terhadap kawasan Arab-Islam melalui peran aktif dalam perdamaian Arab-Israel, baik yang berkaitan dengan Syria maupun Palestina, mewujudkan perdamaian nasional di Lebanon dan Palestina, dan membangun kerjasama dengan sejumlah negara Teluk guna meredam atau mengatasi dampak negatif dari invasi Amerika Serikat ke Irak yang sangat mempengaruhi kawasan tersebut terutama bagian yang dikuasai Kurdi.

Yang dikehendaki Turki adalah memainkan peran Al-Quwwah Al-Layyinah (soft power) dalam kapasitasnya sebagai negara keenam belas tingkat ekonominya di dunia (keenam di Eropa), terminal penghubung di Benua Euroasia, dan jembatan penghubung antara 2 peradaban Islam dan Barat. Dan yang terpenting adalah Turki sebagai model percontohan baru dan ideal, yang menjadi teman menyenangkan bagi Islam, liberalisme, dan sekularisme.

Prinsip-prinsip utama pendekatan Ahmet Davutoglu yang baru adalah apa yang dinamakan Siyash Al-La Musykilah (politik Tanpa Masalah) dengan negara-negara tetangga. Arah dan kebijakan politik ini sangat berkontradiksi dengan yang terjadi pada tahun sembilan puluhan. Tepatnya ketika Ankara

membangun hubungan diplomatik dengan negara-negara tetangganya dengan barapi.

Di samping itu, pada masa lalu Turki berupaya menjamin keselamatan wilayah kekuasaannya melalui pengembangan pertahanan militer melawan berbagai bahaya yang mengancam di sekitar wilayah tersebut. Akan tetapi bersamaan dengan kebijakan politik yang diterapkan Partai Keadilan dan Pembangunan, Turki menyadari bahwa negara-negara yang menjalankan kekuasaannya di perbatasan menggunakan soft power lah yang akan mampu menjaga dan melindungi wilayahnya. Hal ini sebagaimana diungkapkan Ahmed Davutoglu dalam *Al-'Amq Al-Istiratiiji (Strategi Intensif)*.

Kemudian, sejak berdirinya negara Turki Modern, hubungan Turki dengan negara tetangga khususnya di Timur Tengah mengalami fase-fase yang sangat buruk. Dengan adanya masalah Hatay dan Mosul menjadikan Turki selalu berkonflik dengan Irak dan Syria. Namun ternyata setelah AKP berkuasa di Turki, kebijakan luar negeri Turki terhadap Timur Tengah mulai mengarah ke hubungan yang lebih baik.

Penolakan Turki memberikan fasilitas dan kerjasama yang diminta Washington untuk menginvasi Irak tahun 2003 merupakan keputusan yang tidak hanya berani, melainkan juga "*As-Sa'ah Al-Haqiqah*" (keputusan yang tepat) mengenai dimulainya kebijakan-kebijakan baru Politik Luar Negeri Turki di bawah pemerintahan Erdogan. Meskipun banyak kritikan yang dilontarkan terhadap pengambilan kebijakan ini di parlemen pada awal Maret tahun 2003

akan tetapi pada akhirnya terlihat kebenarannya. Dan inilah sikap pemerintahan Turki ketika itu terhadap permasalahan Irak.

Adapun sekarang, Turki memiliki kompetensi dalam berbagai bidang kehidupan, mulai dari politik internasional, menengahi berbagai konflik di Balkan, Timur Tengah, Kaukasus, sehingga dengan begitu ia pun mampu mengubah Negara-negara yang dulunya bermusuhan seperti Rusia dan Syria menjadi teman dekat.

Turki telah menjalani berkali-kali peran sebagai mediator antara Syria dan Israel dan juga antara Syria dengan Iraq. Israel dan Syria telah mengadakan 5 putaran dialog tidak langsung di bawah mediasi Turki pada tahun 2008 tentang masa depan Israel menguasai Dataran tinggi Golan di perbatasan antara dua Negara (Seibert, 2010). Ini merupakan hasil dari politik luar negeri Turki tanpa musuh serta persahabatan dekatnya dengan Syria. Kedua Negara telah menjelaskan pendekatan yang sangat hati-hati dalam hubungan timbale balik mereka. Turki adalah Negara sekuler dengan hubungan yang sangat dekat dengan NATO, EU, USA dan Israel, yang telah berkurang kepercayaan satu sama lain dan telah berkontribusi untuk terjadinya keadaan hubungan yang bermasalah sebelumnya. Provinsi Turki yang sekarang disebut Sanjak Alexandretta telah lama menjadi wilayah yang diperebutkan. Hal ini kemudian diikuti dengan konflik-konflik sekitar penggunaan air dari Sungai eufrat dan dukungan Syria untuk PKK. Setelah memburuknya krisis di tahun 1998, beberapa perjanjian antara Syria dan Turki ditandatangani termasuk kerjasama untuk melawan PKK bersama. Rasa saling percaya telah dikuatkan dengan penolakan Turki untuk berpartisipasi pada invasi ke Iraq tahun 2003 dan hubungan hubungan pun diperbaiki setelah

pembentukan era baru dalam hubungan tahun 2007 dengan dukungan untuk mengadakan area perdagangan bebas dan khususnya di tahun 2009 setelah penandatanganan Deklarasi Politik untuk pembangunan strategi level tinggi.

Kemudian ada beberapa faktor yang mempengaruhi kebijakan luar negeri Turki yang beralih kiblat ke Timur Tengah tersebut. Namun yang paling utama adalah karena AKP mampu mempengaruhi arah kebijakan luar negeri Turki, yakni menggunakan:

1. Bureaucratic Influencer

Dalam hal ini, AKP telah membuat strategi yang sangat cerdas dalam mempengaruhi kebijakan luar negeri di Turki. 3 tokoh besar AKP, yakni Erdogan, Abdullah Gul, dan Ahmet Davutoglu menduduki posisi-posisi penting di cabinet pemerintahan, yakni menduduki posisi sebagai Perdana Menteri, Presiden, serta Menteri Luar Negeri.

Bahkan, dengan adanya pemilu presiden secara langsung yang diadakan pada tanggal 10 Agustus 2014 yang lalu, Erdogan sebagai pendiri AKP telah merencanakan untuk memberi kewenangan yang sangat luas kepada presiden agar bias berperan banyak dalam perpolitikan domestic maupun internasional.

Situs 24News menulis, AKP telah bersumpah untuk mengubah konstitusi agar memberikan kekuasaan lebih kepada Presiden. Media ini menyebutkan, artinya Turki akan memiliki sistem presidensial yang mirip dengan Prancis, ketimbang demokrasi parlementer yang populer saat ini.

2. Partisan Influencer

Pada 2002, mereka memenangkan 34,3 % suara dari total suara dan menjadi partai pemenang di pemilihan umum, dengan Abdullah Gul pertama sebagai Presiden, yang kemudian digantikan oleh Erdogan setelah sanksi politiknya dicabut. 3 koalisi partai lainnya tereliminasi. CHP pun muncul sebagai oposisi utama. Untuk pertama kalinya dalam beberapa decade ini, AKP berakhir sebagai partai tunggal di pemerintahan. AKP menolak label "Islamis" dan mendeklarasikan diri sebagai pendukung Barat dengan agenda social yang "conservative" namun juga teguh pada komitmen ekonomi pasar bebas serta keanggotaan Uni Eropa. Pada pemilu 2007, mereka mendapatkan 46,58 % suara dan total suara, dan memenangkan pemilu untuk kedua kalinya, menduduki 341 kursi parlemen. Pada pemilu 2011 mereka meningkatkan perolehan suaranya menjadi 49,91 % dan mendapat 327 kursi di parlemen, menguasai pemerintahan untuk ke-3 kalinya.

Dengan menguasai 60% hingga 70% kursi legislative dalam 3 kali pemilu sejak tahun 2002, tentu saja AKP bisa mendominasi suara dalam pembuatan kebijakan luar negeri. Apalagi ditambah dengan adanya tokoh-tokoh AKP yang menduduki posisi penting dalam pemerintahan, seperti Erdogan, Abdullah Gul, dan Ahmet Davutoglu.

3. Interset Influencer

Gerakan Muhammad Fethullah Gulen ini memiliki ratusan sekolah agama: 300 unit sekolah di dalam negeri Turki dan 200 lainnya di beberapa Negara di dunia, mulai dari Tanzania, Kenya, Uganda, China, Turkmenistan, Rusia, Mesir, Filipina, Balkan dan Kaukasus.

Gerakan ini juga memiliki beberapa surat kabar, , majalah, stasiun televisi khusus, perusahaan-perusahaan khusus, kerajaan bisnis, dan lembaga-lembaga social. Aktivitas dan kegiatan gerakan ini tidak terbatas pada itu, namun juga merambah pada pembangunan pusat-pusat kebudayaan khusus di beberapa Negara besar di dunia, mengadakan beberapa pertemuan tahunan di Inggris, Uni Eropa, dan Amerika, bekerja sama dengan beberapa perguruan tinggi ternama di dunia untuk mempelajari cara kerja gerakan ini, seberapa jauh pengaruhnya, dan cikal bakal budaya dan sosialnya.⁴⁸ Dengan adanya gerakan atau kelompok kepentingan berbasis kuat yang mempunyai afiliasi dengan Erdogan, maka tak dapat diungkiri bahwa gerakan Fethullah Gulen ini bisa mempengaruhi kebijakan luar negeri Turki. Karena Fethullah Gulen juga mempunyai agenda untuk membangun peradaban Islam yang modern di Timur Tengah dan Kaukasus.

4. Mass Influencer

AKP sebagai partai yang menghadapi banyak tantangan dari kubu sekuler dan militer ternyata mempunyai strategi yang melibatkan opini public dalam pembuatan kebijakannya. Langkah dan kebijakan politik saksama Erdogan menjadi modalitas AKP berinteraksi dengan kubu sekuler dan militer. Kebijakan politik AKP banyak disandarkan pada aspirasi rakyat yang dibuktikan melalui hasil survey atau polling. AKP tampaknya sangat memerhatikan penggunaan metode ilmiah ini dalam menghitung derajat dukungan dan kemudian memformulasikan kebijakann berdasarkan faktor tersebut. Saat dukungan public menguat, maka pada saat itu pula partai ini semakin bertekad menjalankan kebijakan dan maneuver

⁴⁸ Syarif Taghian, op.cit, hal. 184-186.

politiknya. Namun jika dukungan public atau dalam kalkulasi politik riil dipandang tidak begitu menguntungkan, maka mereka tidak segan mundur. Mereka memahami bahwa dalam demokrasi operasi rakyat akan menjadi telak